

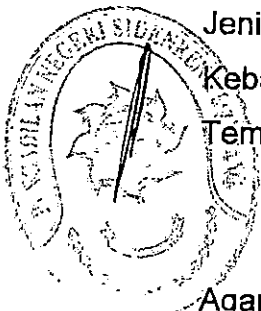
PUTUSAN

Nomor 404/PID.SUS/2018/PT.MKS

" DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA "

Pengadilan Tinggi Makassar, yang mengadili perkara-perkara pidana pada tingkat banding menjatuhkan putusan sebagai berikut, dalam perkara
Terdakwa:

Nama lengkap : Hamka Alias Ambo Angka Bin La Riu;
Tempat lahir : Pujo, Kabupaten Sidenreng Rappang;
Umur/tanggal lahir : 40 tahun /Rabu 30 November 1977;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Dusun II Desa Pujo Desa Bulucenrana
Kecamatan Pitu Riawan, Kab. Sidenreng
Rappang;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Pelani;



Terdakwa ditahan di dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 26 Juni 2018 sampai dengan tanggal 9 Juli 2018;
2. Penuntut Umum, sejak tanggal 9 Juli 2018 sampai dengan tanggal 13 Juli 2018;
3. Hakim Pengadilan Negeri, sejak tanggal 11 Juli 2018 sampai dengan tanggal 9 Agustus 2018;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah membaca:

1. Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Makassar tanggal 7 Agustus 2018 Nomor 404/PID.SUS/2018/PT.MKS Tentang Penunjukan Majelis Hakim yang mengadili perkara ini;
2. Penunjukan Panitera Pengganti oleh Panitera Pengadilan Tinggi Makassar tanggal 7 Agustus 2018 Nomor 404/PID.SUS/2018/PT.MKS untuk membantu Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini;
3. Berkas perkara dan surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa dia terdakwa HAMKA alias AMBO ANGKA bin LA RIU, pada hari Senin tanggal 25 Juni 2018 sekira pukul 17.30 Wita atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Juni 2018, bertempat di Dusun II Pujo Desa Bulucenrana Kecamatan Pitu Riawa Kabupaten Sidenreng Rappang atau setidaknya pada tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sidenreng Rappang, dengan sengaja melakukan perbuatan melawan hukum menerima pemberian atau janji dari yang melakukan perbuatan melawan hukum menjanjikan atau memberikan uang atau materi lainnya sebagai imbalan kepada warga negara Indonesia baik secara langsung ataupun tidak langsung untuk mempengaruhi Pemilih agar tidak menggunakan hak pilih, menggunakan hak pilih dengan cara tertentu sehingga suara menjadi tidak sah, memilih calon tertentu, atau tidak memilih calon tertentu, dengan cara antara lain sebagai berikut :

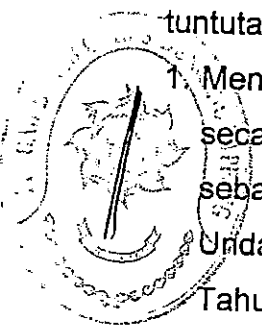


Bermula pada hari Senin tanggal 25 Juni 2018 sekira pukul 14.00 Wita saksi TAHIR bin LAONDING (dituntut secara terpisah) ikut menghadiri pertemuan yang dipimpin OLLONG (belum tertangkap) di salah satu rumah yang terletak di Kelurahan Rappang Kecamatan Pance Rijang, pada saat itu saksi TAHIR menerima uang sebesar Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah), dengan rincian saksi TAHIR memperoleh sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dan saksi TAHIR mencari 5 (lima) rumah untuk dibagikan sisanya sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) sehingga masing-masing rumah / Kepala Keluarga memperoleh sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dengan persyaratan untuk mencoblos Pasangan Calon Bupati / Wakil Bupati No. Urut 1 Hj. FATMAWATI RUSDI, SE / H. ABD MAJID, SE, MSI (FATMA) pada saat pelaksanaan PILKADA tanggal 27 Juni 2018 dan dilampirkan bukti penyerahan uang berupa foto copy Kartu Keluarga yang dikumpulkan kepada saksi HASNATANG (dituntut secara terpisah), kemudian pada hari Senin tanggal 25 Juni 2018 sekira pukul 17.30 Wita terdakwa yang sedang santai di rumahnya yang terletak di Dusun II Pujo Desa Bulucenrana Kecamatan Pitu Riawa Kabupaten Sidenreng Rappang didatangi oleh saksi TAHIR, kemudian saksi TAHIR menawarkan uang kepada terdakwa sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) lalu terdakwa menerimanya, pada saat saksi TAHIR mengatakan kepada terdakwa agar mencoblos Pasangan Calon Bupati / Wakil Bupati No. Urut 1 Hj. FATMAWATI

RUSDI, SE / H. ABD MAJID, SE, MSi (FATMA) pada saat pelaksanaan PILKADA Tahun 2018 lalu terdakwa menyerahkan foto copy Kartu Keluarga terdakwa kepada saksi TAHIR.

Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 187A ayat (2) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas UU No. 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-undang jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana.

Menimbang, bahwa selanjutnya Penuntut Umum telah mengajukan tuntutan terhadap Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:

- 
1. Menyatakan Terdakwa HAMKA alias AMBO ANGKA bin LA RIU terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan "Tindak Pidana Pemilihan" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 187A ayat (2) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas UU No. 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-undang, sebagaimana dalam Surat Dakwaan;
 2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa HAMKA alias AMBO ANGKA bin LA RIU dengan pidana penjara selama 36 (Tiga puluh enam) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dan denda sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) subsidi 1 (satu) bulan kurungan;
 3. Menetapkan terdakwa HAMKA alias AMBO ANGKA bin LA RIU tetap berada dalam tahanan
 4. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 2 (dua) lembar foto copy Kartu Keluarga (KK) masing-masing atas nama SUGIMAN dan HAMKA;Tetap terlampir dalam berkas perkara.
 - Uang tunai sebanyak 7 lembar pecahan Rp. 100.000,-;Dirampas untuk negara.
 5. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sidenreng Rappang menjatuhkan putusan Nomor 227/ Pid.Sus/ 2018/ PN. Sdr tanggal 23 Juli 2018 yang amarnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Hamka Alias Ambo Angka Bin La Riu telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Turut serta melakukan perbuatan melawan hukum menerima uang sebagai imbalan untuk memilih calon tertentu";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan, dan denda sejumlah Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah), dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 2 (dua) lembar foto copy Kartu Keluarga (KK) masing-masing atas nama Kepala Keluarga Sugiman dan atas nama Kepala Keluarga Hamka;
 - Uang tunai sebanyak Rp 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah);Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara Tahir Bin Laonding;
6. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,00 (dua ribu rupiah).

Menimbang, bahwa atas putusan tersebut, sesuai dengan Akta Permintaan banding Nomor 31/Akta.Pid /2018/PN. Sdr tanggal 24 Juli 2018, Jaksa Penuntut Umum mengajukan permintaan banding. Permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 25 Juli 2018;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan permintaan banding tersebut, Jaksa Penuntut Umum mengajukan memori banding pada tanggal 27 Juli 2018, memori banding tersebut diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sidenreng Rappang pada tanggal 30 Juli 2018 dan telah disampaikan kepada Terdakwa pada tanggal 31 Juli 2018 ;

Menimbang bahwa atas memori banding Jaksa Penuntut Umum tersebut Terdakwa tidak mengajukan kontra memori banding ;

Menimbang, bahwa kepada Terdakwa dan kepada Jaksa Penuntut Umum telah diberitahukan untuk membaca dan mempelajari berkas perkara dalam tenggang waktu 7 (tujuh) hari kerja, sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi Makassar, sebagaimana tersebut dalam surat Pemberitahuan Memeriksa Berkas Perkara tertanggal 31 Juli 2018 ;

Menimbang, bahwa permintaan dan pemeriksaan dalam tingkat banding oleh Jaksa Penuntut Umum diajukan dalam tenggang waktu dan tata cara serta syarat-syarat yang ditentukan dalam Undang-undang, maka permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan memori banding sebagai berikut ;

Mengingat ketentuan Pasal 67, 233 Jo. 237 KUHP Jo. Pasal 143, 149 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas UU No. 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota terhadap putusan Pengadilan Negeri Sidenreng Rappang Nomor: 227/Pid.Sus/2018/PN Sdr tanggal 23 Juli 2018 dalam perkara atas nama terdakwa:

Nama lengkap	: HAMKA alias AMBO ANGKA bin LA RIU
Tempat lahir	: Pujo Kabupaten Sidenreng Rappang
Umur/tgl. Lahir	: 36 Tahun / 30 Nopember 1977
Jenis kelamin	: Laki-laki
Kebangsaan	: Indonesia
Tempat tinggal	: Dusun II Pujo Desa Bulucenrana Kecamatan Pitu Riawa Kab. Sidenreng Rappang
A g a m a	: Islam
Pekerjaan	: Petani
Pendidikan	: SD (tidak tamat)

Dengan amar putusan :

1. Menyatakan terdakwa HAMKA alias AMBO ANGKA bin LA RIU telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "turut serta melakukan perbuatan melawan hukum menerima uang sebagai imbalan untuk memilih calon tertentu";

2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan dan denda sejumlah Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangi seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:

- 2 (dua) lembar foto copy Kartu Keluarga (KK) masing-masing atas nama Kepala Keluarga Sugiman dan atas nama Kepala Keluarga HAMKA;
Uang tunai sebanyak Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah);

Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara
TAHIR bin LAONDING.

6. Membebankan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Atas putusan tersebut, terdakwa menyatakan : menerima.

Kami Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sidenreng Rappang tanggal 24 Juli (jadi masih dalam tenggang waktu yang ditentukan oleh undang-undang) telah menyatakan banding. Karena kami Pemohon Banding/Penuntut Umum sampai dibuatnya memori Banding ini belum menerima salinan Putusan lengkap dari Majelis Hakim namun hanya menerima petikan putusan sehingga Pemohon Banding/Penuntut Umum tidak bisa menguraikan pertimbangan-pertimbangan putusan dari Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sidenreng Rappang secara terperinci, tetapi Pemohon Banding/Penuntut Umum akan menguraikan keberatan berdasarkan inti dari putusan Majelis Hakim yang kami tidak sependapat pada saat pembacaan putusan pada tanggal 23 Juli 2018.

Adapun alasan-alasan yang kami ajukan untuk menyatakan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Sidenreng Rappang tersebut ialah sebagai berikut:

Peraturan hukum tidak diterapkan sebagaimana mestinya.

Berdasarkan pasal 187A ayat (2) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas UU No. 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2014

tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota dalam ancaman pidana penjara dan pidana denda terhadap pasal tersebut berlaku ketentuan minimum khusus yaitu pidana penjara paling singkat 36 (tiga puluh enam) bulan dan paling lama 72 (tujuh puluh dua) bulan dan denda paling sedikit Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah), namun dalam putusan No. 227/Pid.Sus/2018/PN Sdr tanggal 23 Juli 2018 Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sidenreng Rappang menjatuhkan pidana penjara kepada terdakwa selama 1 (satu) bulan dan denda sejumlah Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah).

Bahwa Undang-undang No. 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota dalam penjelasan BAB I huruf g menjelaskan bahwa pengaturan sanksi yang jelas bagi yang melakukan politik uang (money politic) dalam pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota, hal tersebut sejalan seperti yang telah kami tuangkan di hal-hal yang memberatkan dalam tuntutan kami yaitu "perbuatan terdakwa dapat merusak sistem Demokrasi yang bersih" karena sejatinya pemimpin dipilih berdasarkan hati nurani rakyat tanpa pengaruh apapun terlebih lagi pengaruh materi dalam hal ini "uang" sehingga dapat terwujud pemimpin seperti yang di harapkan dalam Negara Demokrasi.

Bahwa dalam ketentuan Pidana pasal yang dilanggar oleh terdakwa tersebut tidak menentukan batas-batas minimal jumlah materi baik itu yang memberi maupun yang menerima, maka tujuan dari Undang-undang ini bukan hanya karna jumlah nominal namun lebih kepada dampak dan bahaya yang ditimbulkan, oleh karena itu sudah tepat apabila terhadap pelaku politik uang dihukum dengan pidana yang berat dengan adanya ketentuan pidana minimum khusus, bukan hanya sekedar menghukum maupun membuat jera pelaku namun juga sebagai sarana preventif dalam penegakan hukum.

Oleh karena itu, dengan ini kami mohon supaya Pengadilan Tinggi Makassar membatalkan putusan Pengadilan Negeri Sidenreng Rappang Nomor: 227/Pid.Sus/2010/PN Sdr tanggal 23 Juli 2018 dengan menerima permohonan banding dan:

1. Menyatakan Terdakwa HAMKA alias AMBO ANGKA bin LA RIU terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan "Tindak Pidana Pemilihan" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 187A ayat (2) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas UU No. 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-undang, sebagaimana dalam Surat Dakwaan;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa HAMKA alias AMBO ANGKA bin LA RIU dengan pidana penjara selama 36 (Tiga puluh enam) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dan denda sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) subsider 1 (satu) bulan kurungan;
3. Menetapkan terdakwa HAMKA alias AMBO ANGKA bin LA RIU tetap berada dalam tahanan
4. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 2 (dua) lembar foto copy Kartu Keluarga (KK) masing-masing atas nama SUGIMAN dan HAMKA;Tetap terlampir dalam berkas perkara.
 - Uang tunai sebanyak 7 lembar pecahan Rp. 100.000,-;Dirampas untuk negara.
5. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Sesuai dengan apa yang kami mintakan dalam tuntutan pidana yang kami ajukan pada hari Kamis, tanggal 19 Juli 2018 yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari memori banding ini.

Namun demikian seandainya Majelis Hakim pada Pengadilan Tinggi Makassar berpendapat lain, kami mohon kiranya terhadap terdakwa dijatuhi pidana yang seadil-adilnya setimpal dengan perbuatan yang dilakukannya.

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim tingkat banding membaca, mempelajari dengan teliti dan seksama, berkas perkara yang terdiri dari berita acara persidangan, salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Sidenreng Rappang tanggal 23 Juli 2018 Nomor 227/Pid.Sus/2018/PN. Sdr, beserta semua bukti -buktinya dan memperhatikan alasan-alasan dalam memori banding Penuntut Umum, berpendapat bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi

memandang perlu untuk mengadakan perbaikan sekedar mengenai pidana yang dijatuhkan kepada terdakwa dengan pertimbangan sebagai berikut di bawah ini ;

Menimbang, bahwa pidana yang dijatuhkan kepada terdakwa tidak hanya mendidik Terdakwa sendiri, tetapi juga sebagai contoh bagi masyarakat lainnya supaya tidak berbuat serupa dengan perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa ;

Menimbang, bahwa perbuatan terdakwa dapat merusak sistem Demokrasi yang baik dan telah meresahkan masyarakat dalam hal terjadinya suap menyuap untuk mempengaruhi masyarakat agar memilih salah satu pasangan calon tertentu dalam pemilihan calon Bupati Kepala Daerah ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas putusan Pengadilan Negeri Sidenreng Rappang tanggal 23 Juli 2018 Nomor 227/Pid.Sus/2018/PN.Sdr.harus diperbaiki sekedar mengenai pidana yang dijatuhkan kepada terdakwa sedangkan selebihnya dikuatkan yang amarnya sebagaimana tersebut di bawah ini ;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan memori banding dari Jaksa Penuntut Umum, Pengadilan Tinggi berpendapat tidak ada hal-hal baru untuk dipertimbangkan karena telah dipertimbangkan oleh Hakim tingkat pertama dalam pertimbangannya, sehingga alasan keberatan dalam memori banding tersebut patut untuk dikesampingkan ;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka putusan Pengadilan Negeri Sidenreng Rappang Nomor 227/Pid.sus/2018/PN. Sdr tanggal 23 Juli 2018 dapat diperbaiki ;

Menimbang, bahwa karena menurut pendapat Majelis Hakim Pengadilan Tinggi cukup alasan untuk menetapkan terdakwa tetap ditahan ;

Menimbang, bahwa lamanya Terdakwa berada dalam tahanan patutlah dikurangkan seluruhnya terhadap pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka kepadanya harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam tingkat banding ;

Memperhatikan ketentuan 187A ayat (2) Jo Pasal 69 huruf c Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun

2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang Jo Pasal 55 ayat (1) ke- 1 KUHP, Pasal 197 dan pasal-pasal lain dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana serta peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum ;
2. Mengubah putusan Pengadilan Negeri Sidenreng Rappang Nomor 227/Pid.sus/2018/PN. Sdt tanggal 23 Juli 2018 yang dimintakan banding tersebut sekedar mengenai lamanya pidana penjara yang dijatuhkan kepada Terdakwa sehingga amar selengkapanya berbunyi sebagai berikut ;



1. Menyatakan terdakwa Hamka Alias Ambo Angka Bin La Riu telah terbukti secara syah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Turut serta melakukan perbuatan melawan hukum menerima uang sebagai imbalan untuk memilih calon tertentu";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan dan denda sejumlah Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah), dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 2 (dua) lembar foto copy Kartu Keluarga (KK) masing-masing atas nama Kepala Keluarga Sugiman dan atas nama Kepala Keluarga Hamka;
 - Uang tunai sebanyak Rp 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah);Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara Tanir Bin Laonding;
6. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 3.000,00 (tiga ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi, Makassar pada hari **Kamis** tanggal **9 Agustus**

2018 oleh kami **MAKKASAU, SH.MH** selaku Ketua Majelis Hakim, **AHMAD SHALIHIN, SH.MH** dan **I MADE SERAMAN, SH.MH** masing-masing selaku Anggota Majelis Hakim. Putusan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **dan tanggal itu juga** oleh Ketua Majelis Hakim dengan dihadiri Para Anggota Majelis Hakim dan dibantu **NY. TIMANG, SH.**, Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi tersebut, tanpa dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa ;

ANGGOTA MAJELIS HAKIM

KETUA MAJELIS HAKIM,

ttd

AHMAD SHALIHIN, SH.MH

ttd

MAKKASAU, SH.MH

ttd

I MADE SERAMAN, SH.MH

PANITERA PENGGANTI,

ttd

NY. TIMANG, SH.

BALINANI ST. 001/15/2018/PT. MKS
4n PANITERA PENGADILAN NEGERI
SIDENRENG RAPPANG
PANMUP, PIDANA
ANTAR, SH
NIP. 19680915 199303 1003.